

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 3, September 2017

ISSN 0853-9316

- OPTIMALISASI MANFAAT *ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE* BAGI INDONESIA
oleh : Lukman Adam
- TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
oleh : Meirina Fajarwati
- BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
oleh : Lesmana Rian Andhika
- MODEL ALTERNATIF PENDANAAN PARTAI POLITIK
oleh : Mei Susanto
- STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017
oleh : Rahmi Yuningsih



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 3, September 2017

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i
● OPTIMALISASI MANFAAT <i>ONE BELT, ONE ROAD</i> INITIATIVE BAGI INDONESIA oleh : Lukman Adam	181-193
● TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL oleh : Meirina Fajarwati.....	195-204
● BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK oleh : Lesmana Rian Andhika	205-219
● MODEL ALTERNATIF PENDANAAN PARTAI POLITIK oleh : Mei Susanto.....	221-240
● STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 oleh : Rahmi Yuningsih.....	241-255

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi September 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi ini sangat beragam, baik bidang hukum, politik, kesehatan masyarakat maupun ekonomi. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Optimalisasi Manfaat **One Belt, One Road Initiative** Bagi Indonesia”, yang ditulis oleh Lukman Adam dari Pusat Penelitian. Artikel ini mengulas tentang China yang memiliki ambisi menghidupkan inisiatif **one belt one road** (OBOR) yang berkaitan juga dengan jalur sutera maritim pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia, keberadaan OBOR membuat munculnya alternatif pembiayaan di Indonesia dan memfasilitasi akses distribusi barang dan jasa ke China dan negara lain. Faktor yang dapat membuat investasi OBOR menjadi tidak efektif bagi Indonesia merupakan faktor internal. Di antara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, kinerja ekonomi Indonesia cukup baik. Namun, total hutang luar negeri yang cukup besar dan total pengukuran risiko investasi yang tinggi memerlukan perhatian. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam optimalisasi investasi OBOR adalah pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, skeptisme asal pembiayaan, arah kebijakan daerah yang berubah-ubah, dan keberadaan peraturan daerah yang dapat menghambat investasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penguatan koordinasi antara Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan kehati-hatian, serta implementasi dan kebijakan.

Artikel kedua adalah tentang “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional”, yang ditulis oleh Meirina Fajarwati dari Pusat Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI. Program legislasi nasional (yang selanjutnya disebut prolegnas) merupakan instrumen perencanaan pembangunan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai prolegnas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam prolegnas terdapat daftar kumulatif terbuka yang mana salah satu isi dari daftar kumulatif terbuka yaitu akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sampai saat ini baik DPR ataupun Pemerintah belum menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari daftar prolegnas tahun 2015-2019 yang mana didalamnya hanya memuat 1 undang-undang yang merupakan tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi yaitu RUU Perkoperasian. lambatnya tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi dapat disebabkan karena tidak adanya jangka waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan norma dalam undang-undang. Tidak ditindaklanjutinya putusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat jika hal ini terus dibiarkan. Oleh karena itu kedepannya perlu diatur mengenai jangka waktu tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi dalam UU No 12 Tahun 2011.

Tulisan ketiga membahas isu Pemilihan Kepala Desa dengan judul “Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak”, yang ditulis oleh Lesmana Rian Andhika dari Universitas Padjadjaran. Pemilihan umum merupakan refleksi dari demokrasi, pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun dalam pelaksanaannya masih merefleksikan strategi yang unik dan menimbulkan konsekuensi negatif. Strategi pemenangan itu memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Adanya kebijakan pemerintah dengan dana desa memberikan daya tarik tersendiri kepada siapapun untuk mencalonkan diri. Konsekuensi negatif dari strategi pemenangan menunjukkan kepada pola pembelian suara pemilih, patronase dan klientelisme yang terjadi awal pemilihan yang tidak demokratis. Menumbuhkan bibit permusuhan antara kerabat, menimbulkan kebencian diantara pendukung calon kepala desa. Strategi pemenangan yang muncul akan memperburuk demokrasi bangsa, dibeberapa kondisi akan menimbulkan konflik. Itu semua terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar, faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab patronase, klientelisme dan **vote buying** bisa terlaksana dengan baik.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Mei Susanto dari Universitas Padjadjaran dengan judul “Model Alternatif Pendanaan Partai Politik”. Persoalan pendanaan partai politik seperti biaya kampanye yang mahal, sumbangan ilegal, korupsi anggaran “oknum” anggota partai politik, serta keengganan partai politik untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan pendanaan menunjukkan partai politik tidak terbuka dan modern. Model pengaturan mengenai pendanaan partai politik di Indonesia, masih sering berubah dan belum

memberikan pengaturan yang adil bagi partai politik. Tanpa ditopang pendanaan yang kuat, partai politik tidak akan mampu bertahan. Implikasinya hanya partai politik yang mempunyai jaringan dan usaha-usaha tertentu yang mampu bertahan dan memenangkan kontestasi. Untuk itu diperlukan model pendanaan partai politik dalam bentuk penyeimbangan pendanaan antara sumbangan (perorangan atau badan usaha) dan bantuan pendanaan publik dari APBN-APBD, sehingga akan memberikan keadilan akses pendanaan dan dapat memaksa partai politik untuk terbuka dalam pendanaannya. Model tersebut diikuti juga dengan penggunaan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam pengelolaan keuangan partai politik, standarisasi laporan, pembatasan sumbangan dan kemungkinan penggunaan pihak ketiga untuk mengakali pembatasan tersebut, penggunaan transaksi elektronik, dan pengawasan, sanksi serta penegakan hukum yang diperkuat. Kesemua itu dalam rangka mencari model pendanaan partai politik menuju partai yang terbuka dan modern.

. Tulisan tentang “Strategi Promosi Kesehatan Dalam Menurunkan Angka Kematian Balita Di Provinsi Gorontalo Tahun 2017” yang ditulis oleh Rahmi Yuningsih dari Pusat Penelitian merupakan artikel penutup dalam edisi ini. Lingkungan merupakan salah satu determinan kesehatan masyarakat. Provinsi Gorontalo termasuk provinsi dengan kualitas lingkungan hidup terbaik di Indonesia namun belum diimbangi dengan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mortalitas atau kematian sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo terutama kematian balita. Penyebab utama kematian balita di Provinsi Gorontalo adalah penyakit menular yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan. Angka kematian balita dapat diturunkan melalui implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang memadukan pendekatan lingkungan dengan promosi kesehatan. Optimalisasi program tersebut dapat dilakukan melalui penguatan strategi promosi kesehatan seperti upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan September 2017. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS; Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si; Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy dan Dr. Syarif Hidayat sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, September 2017

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Lukman Adam (Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

OPTIMALISASI MANFAAT *ONE BELT, ONE ROAD* INIATIVE BAGI INDONESIA

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 181-193

Sejak tahun 2014, Indonesia telah memperkenalkan kebijakan jalur maritim, sedangkan China menginisiasi **one belt one road** (OBOR). Indonesia bisa mengambil manfaat optimal dari inisiatif China tersebut, karena keberadaan OBOR menyediakan alternatif pembiayaan dan dapat memfasilitasi akses distribusi barang Indonesia ke Asia dan Eropa. Namun, dijumpai masalah terkait investasi OBOR, yaitu tingginya tingkat risiko investasi di Indonesia dan tidak optimalnya implementasi kebijakan investasi dan infrastruktur. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui: (1) posisi Indonesia kepada negara yang berkomitmen, (2) kendala yang dihadapi Indonesia dalam optimalisasi investasi OBOR, dan (3) upaya yang perlu dilakukan Indonesia untuk memperoleh manfaat optimal atas investasi OBOR. Di lapangan, kendala yang dihadapi Indonesia adalah pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, skeptisme asal pembiayaan, arah kebijakan daerah yang berubah-ubah, dan keberadaan peraturan daerah yang dapat menghambat investasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah penguatan koordinasi antara Pemerintahan di Pusat dan Daerah. Di masa depan, keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan investasi asing harus ditingkatkan, agar terjadi kesamaan pemahaman.

Kata kunci: OBOR, China, Indonesia, investasi, infrastruktur.

Meirina Fajarwati (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 195-204

Program legislasi nasional atau prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum di Indonesia, pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam prolegnas terdapat daftar kumulatif terbuka yang salah satu isinya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai saat ini, baik DPR ataupun Pemerintah, belum menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari daftar prolegnas tahun 2015-2019 yang hanya memuat 1 Undang-undang, yang merupakan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yaitu RUU Perkoperasian. Lambatnya tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan tidak adanya batas waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma dalam undang-undang. Tidak ditindaklanjutinya putusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perlu diatur batas waktu tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU No 12 Tahun 2011.

Kata Kunci: program legislasi nasional, MK, putusan, RUU Perkoperasian, daftar kumulatif

BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 205-219

Pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih merefleksikan strategi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Strategi pemenangan ini memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian *case study method*. Penggalan data primer dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yang bersifat terbuka (*unstructured interviews*) dan observasi *non* partisipasi. Data empiris yang didapat dianalisis dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, kebijakan pemerintah dengan dana desa memberikan daya tarik kepada siapapun untuk mencalonkan diri. Konsekuensi negatif dari strategi pemenangan menunjukkan pola patronase dan klientelisme, yang menjadi awal pemilihan yang tidak demokratis. Bahaya yang ditimbulkan akibat strategi ini menumbuhkan bibit permusuhan antara kerabat, menimbulkan kebencian di antara pendukung calon kepala desa. Bahaya itu terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar, demikian pula, faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya patronase, klientelisme.

Kata kunci: pemilihan serentak, kepala desa, patronase, klientelisme

MODEL ALTERNATIF PENDANAAN PARTAI POLITIK

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 221-240

Persoalan pendanaan partai politik seperti biaya kampanye yang mahal, sumbangan ilegal, korupsi anggaran, serta keengganan partai politik untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana menunjukkan partai politik tidak terbuka dan modern. Tulisan ini meneliti pengaturan pendanaan partai politik di Indonesia dan implikasinya, dan bagaimana alternatif model pendanaan guna mewujudkan partai politik yang terbuka dan modern. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lain, serta bahan hukum tersier kamus dan internet yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, model pengaturan pendanaan partai politik di Indonesia masih sering berubah dan belum memberikan pengaturan yang adil. Tanpa ditopang pendanaan yang kuat, partai politik tidak akan mampu bertahan. Implikasinya hanya partai politik yang mempunyai jaringan dan usaha-usaha tertentu yang mampu bertahan dan memenangkan kontestasi. *Kedua*, diperlukan model pendanaan partai politik dalam bentuk penyeimbangan antara sumbangan (perorangan atau badan usaha) dan bantuan pendanaan publik dari APBN-APBD, sehingga akan memberikan keadilan akses pendanaan dan dapat memaksa partai politik untuk terbuka dalam pendanaannya. Model tersebut harus diikuti juga dengan penggunaan prinsip pengelolaan keuangan negara, standarisasi laporan, pembatasan sumbangan dan kemungkinan penggunaan pihak ketiga untuk mengakali pembatasan tersebut, penggunaan transaksi elektronik, dan pengawasan, sanksi serta penegakan hukum yang diperkuat. Kesemua itu dalam rangka mencari alternatif model pendanaan partai politik menuju partai yang terbuka dan modern.

Kata Kunci: partai politik, pendanaan partai politik, partai modern, akuntabilitas, transparansi.

Rahmi Yuningsih (Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA DI
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 241-255

Lingkungan merupakan salah satu determinan kesehatan masyarakat. Provinsi Gorontalo termasuk provinsi dengan kualitas lingkungan hidup terbaik di Indonesia, namun belum diimbangi dengan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mortalitas atau kematian sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo terutama kematian balita. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara mendalam kepada informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita di Provinsi Gorontalo adalah penyakit menular yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan. Angka kematian balita dapat diturunkan melalui implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang memadukan pendekatan lingkungan dengan promosi kesehatan. Optimalisasi program tersebut dapat dilakukan melalui penguatan strategi promosi kesehatan seperti upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: angka kematian bayi, angka kematian balita, promosi kesehatan, Provinsi Gorontalo

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Lukman Adam (Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

OPTIMIZING THE BENEFIT OF ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE FOR INDONESIA

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 181-193

Since 2014, Indonesia has been introducing its maritime belt policy, while China has been launching its one belt one road (OBOR) initiative. From China's initiative, Indonesia can obtain optimum benefit because the existence of OBOR will provide Indonesia with financing alternative and facilitate it with access of goods to Asia and Europe. However, there is a problem dealing with high investment risk and non-optimum implementation of investment and infrastructure policy. The article discusses: (1) Indonesia response to countries committed, (2) constraints faced by Indonesia in optimizing the OBOR investment, and (3) what to be done by Indonesia to be able gain optimum benefits in OBOR investment. Direct problems faced by Indonesia are land acquisition, lack of coordination between central and local governments, skepticism of financing, changing regional policy, and the role of local regulations that may discourage investment climate. Solution must be found in strengthening coordination between the Central and Local Governments. In the future, local government's participation in responding foreign investment must be increased to have common understanding.

Keywords: OBOR, China, Indonesia investment, infrastructure

Meirina Fajarwati (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE FOLLOW UP OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN NATIONAL LEGISLATION PROGRAM

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 195-204

National legislation program (the Prolegnas) as a legal instrument of development planning in Indonesia is stipulated in Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation. In its open cumulative list, there is Constitutional Court's decision which must be followed-up. Until now, however, the Parliament or the Government has not yet responded laws that have been revoked by the Constitutional Court. This can be seen from the list of the national legislation of 2015-2019, which only proposes one law resulting from the Court's decision, namely Cooperatives Bill. The uncertain response can be caused by the absence of time limit for its follow-up by the parliament and the government which has canceled its norms. If this trend continues, this situation may lead to legal vacuum and uncertainty in society Therefore, there is a need to create a time limit to follow-up of the Constitutional Court decision stipulated in Law No. 12 of 2011.

Keywords: national legislation, constitutional court, decision, cooperative bill, open list

Lesmana Rian Andhika (Universitas Padjadjaran)

THE DANGERS OF PATRONAGE AND CLIENTELISM IN SIMULTANEOUS VILLAGES CHIEF ELECTIONS

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 205-219

The election of village chief simultaneously shows the progress of local-level democracy. In practice, it reveals however various strategies which brings about negative consequences. These strategies have roots in habits which have been implemented in large-scale elections. This article is resulted from a qualitative research whose design is a case study method. Primary data is gained from unstructured interviews and the non-participation observations, while the empirical one obtained from triangulation techniques. The results of the research reveal that the existence of village fund draws candidates to run in the elections, but it creates negative consequences in form of the emergences of patronage and clientelism practices, which make elections undemocratic. This has caused disputes among family members and supporters of village chief candidates. Lack of political education, poverty and poor human resources were other factors for the emergence of patronage and clientelism.

Keywords: simultaneous elections, villages chief, patronage, clientelism

AN ALTERNATIVE MODEL OF POLITICAL PARTY FUNDING

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 221-240

The issue of funding of political parties such as expensive campaign costs, illegal donations, corruption of political party members', and the unwillingness of political parties to be open and transparent in funding management show that political parties are still not open and modern. This article aims to examine the issue by focusing on the issues, how the funding arrangements of political parties in Indonesia and their implications, and how alternative funding models of political parties should be introduced to realize an open and modern political party. This study uses normative legal research by utilizing the primary legal materials of statutory regulations, secondary legal materials of books, journals and other scientific papers, as well as tertiary dictionary and internet dictionary materials which are then analyzed qualitatively. This study concludes, first, the regulatory model of the funding is still changing frequently and has not provided a fair arrangement for political parties. Without a strong funding support, political parties will not be able to survive. Therefore, only political parties with networks and businesses can survive and win contestation. Secondly, a political party funding model is required in the form of a financing balance between donations (individuals or business entities) and public funding assistance from state budget, thereby providing justice for access to finance and forcing political parties to be open in funding. The model should be followed by the use of state finance management principles in financial management of political parties, standardization of reports, restrictions on donations and possible use of third parties to circumvent such restrictions, use of electronic transactions, supervision, and sanctions, as well as by strengthening law enforcement. These are pushed to find an alternative model of funding to create an open and modern party.

Keywords: political party, party funding, modern party, accountability, transparency.

STRATEGY OF HEALTH PROMOTION IN REDUCING MORTALITY RATE OF TODDLER IN GORONTALO PROVINCE IN 2017

Kajian Vol. 22, No. 3, Tahun 2017, hlm. 241-255

Environment is one determinant of public health. Gorontalo as Indonesia's province with its best environmental quality has not been balanced with its optimal public health status. Mortality as one indicator of public health still a problem in the Province, especially concerning the death of children under five year. This research uses a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with related informants. The results showed that the main cause of child mortality rate in the Gorontalo Province is communicable disease which is closely related to environmental factors and health behavior. This means that the child mortality rate can be decreased through the implementation of the Community-Based Total Sanitation program which combines environmental approach and health promotion. There are obstacles, nevertheless, in the implementation of the program in the Province. Therefore, its optimalization is required through health promotion strategies such as advocacy, social support and community empowerment to reduce child mortality rate in the Gorontalo Province.

Keywords: infant mortality rate, child mortality rate, toddler, health promotion, Gorontalo Province
